



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : INSPEKTORAT
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LABEK
2. Jabatan : PENGAWAS PEMERINTAH MADYA
3. NHK : 408924

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.394.040.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/65 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 5738 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 550.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/36 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
6. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 104.040.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 141.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 3.150.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 3.634.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. ---**



Sub Total	Rp.	1.541.824.000
III. HUTANG	Rp.	358.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.183.824.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.